

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik*



DITA ANGGRAINI

TM/NIM : 2011/1101612

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

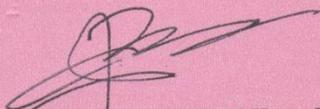
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Dita Anggraini
NIM/TM : 1101612/2011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2015

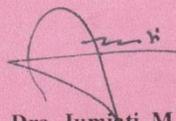
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Aldri Frialdi, SH, M.Hum, Ph.D
NIP. 19700212 199802 1 001

Pembimbing II



Dra. Jumiaty, M.Si
NIP. 19621109 198602 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin, Tanggal 03 Agustus 2015, Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di
Kabupaten Pasaman Barat**

Nama : Dita Anggraini
TM/NIM : 2011/1101612
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2015

Tim Penguji :

Nama	
Ketua	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D
Sekretaris	: Dra. Jumiaty, M.Si
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si

Tanda Tangan



**Mengesahkan:
Dekan FIS UNP**



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Anggraini

NIM/TM : 1101612/2011

Tempat/Tanggal Lahir : Sasak, 17 Oktober 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,


Dita Anggraini
1101612/2011

ABSTRAK

DITA ANGGRAINI (1101612/2011) : Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat, kendala yang dialami BLHKP dalam pelaksanaan pengawasan, upaya yang dilakukan BLHKP untuk mengatasi kendala pengawasan, dan dampak pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair terhadap masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pencemaran Sungai Batang Sariak dan Laut Sasak oleh limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir. BLHKP Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi pengawas lingkungan hidup mempunyai wewenang untuk mengawasi pengolahan limbah cair PKS tersebut.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan penelitian dengan cara *purposive sampling*. Jenis data adalah primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber. Analisa data dengan cara reduksi data, klasifikasi, interpretasi dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari masih ada parameter baku mutu limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir yang berada di atas Standar Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan. BLHKP Kabupaten Pasaman Barat belum mampu mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair baik internal maupun eksternal sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan terkesan lamban. Pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang bermukim di sekitar aliran Sungai Batang Sariak dan nelayan Pantai Sasak, yaitu berkurangnya pencemaran limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir di Sungai Batang Sariak dan Laut Sasak, sehingga fungsi sungai dan laut sebagai penopang banyak kebutuhan pokok masyarakat dan sumber ekonomi masyarakat kembali seperti sediakala.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat**”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH. M.Hum, Ph.D sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, nasehat serta saran kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D, Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Bapak Adil Mubarak, S.IP. M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing penulis selama belajar di UNP.
6. Bapak Asnal selaku Kepala BLHKP Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Gusrizal selaku Kabid Wasdal BLHKP Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Roni Hendri Eka Putra selaku mantan Kabid Wasdal BLHKP Kabupaten Pasaman Barat, Ibu Gusrida, Bapak Amin, Bapak Ziad, Ibu Nina, selaku anggota Tim Pelaksana Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman

Barat, Bapak Andi selaku Staff Bagian Humas PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir dan Bapak Ahmed Renova selaku Asisten Pengawasan Mutu PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir.

7. Teman-teman IAN Angkatan 2011 yang telah bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
8. Teristimewa untuk kedua orangtua dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi. Dengan do'a, dukungan, dan semangat itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiiin

Padang, 03 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	10
B. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Informan Penelitian	39
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
G. Uji Keabsahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	67
C. Pembahasan	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Informan Penelitian	40
4.1 Jumlah Aparatur BLHKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 Berdasarkan Masa Kerja	54
4.2 Jumlah Aparatur BLHKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 Berdasarkan Kelompok Umur	55
.....	
4.3 Jumlah Aparatur BLHKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 Berdasarkan Pangkat/ Golongan	56
4.4 Kolam Limbah PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir 62	
4.5 Hasil Uji Limbah Cair Pada <i>Outlet</i> PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir Oleh Balabkes Sumatera Barat Semester II Tahun 2014	86
4.6 Temuan Lapangan dan Saran Tindak Pengelolaan Lingkungan Hidup PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	36
4.1 Diagram Masa Kerja Aparatur BLHKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014	54
4.2 Diagram Kelompok Umur Aparatur BLHKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 55	
4.3 Diagram Pangkat/ Golongan Aparatur BLHKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014	56
4.4 Struktur Organisasi BLHKP Kabupaten Pasaman Barat	57
4.5 <i>Lay Out</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	121
2. Dokumentasi Penelitian	128
3. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial	132
4. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat.....	133
5. Surat Selesai Penelitian Dari BLHKP Kabupaten Pasaman Barat	134

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi ini yang tidak luput dari perencanaan akan kemajuan, yang berarti pula membutuhkan pengawasan terhadap konsistensi pelaksanaan dari perencanaan. Termasuk pada organisasi publik yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah yang juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dibidang ketertiban, ketenteraman, koordinasi, dan pengawasan umum pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan oleh Sujamto dalam Silvie Ofranov (2011: 17-18), dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintah, fungsi pengawasan adalah sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah dengan masyarakat, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hak pengawasan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, oleh karena itu pada instansi pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan yaitu pengawas yang termasuk urusan-urusan pemerintah yang meliputi bidang ketertiban, ketenteraman, koordinasi dan pengawasan umum pemerintah daerah.

Pengawasan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu agenda penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah yang terkait lingkungan hidup. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Implementasi UU No. **32 Tahun**

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sesuai dengan pasal 71 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor **32 Tahun 2009** Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Adapun bentuk-bentuk pengawasan lingkungan hidup menurut pasal 74 ayat 1 UU No. **32 Tahun 2009** Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: melakukan pemantauan; meminta keterangan; membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan; memasuki tempat tertentu; memotret; membuat rekaman audio visual; mengambil sampel; memeriksa peralatan; memeriksa instalasi dan/ atau alat transportasi; dan/ atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Indonesia, dalam rangka implementasi UU No. **32 Tahun 2009** Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Pasaman Barat dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011. Adapun penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta uraian tugas BLHKP ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 78 Tahun 2011. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu fungsi BLHKP Kabupaten Pasaman Barat adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut Bapak Ziad Abdul Razak, staf teknis Bidang Pengawasan dan Konservasi BLHKP Kabupaten Pasaman Barat, pada wawancara tanggal 29 Agustus 2014, objek atau sasaran pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang paling utama adalah pengolahan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS), karena berpotensi sebagai sumber pencemar terbesar

mengingat banyaknya industri pengolahan kelapa sawit di daerah ini. Namun, menurut bapak Ziad, dalam pelaksanaannya terkendala oleh banyak faktor, diantaranya yaitu jumlah personil tim pengawas lingkungan hidup BLHKP Kabupaten Pasaman Barat belum mencukupi dan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ada belum memadai, sehingga adanya pembiaran-pembiaran terhadap PKS yang tidak sadar lingkungan, dan langsung membuang limbah cairnya kesungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sejalan dengan pendapat Cunningham dan Saigo dalam Zul Adri (2011: 2) menjelaskan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh masyarakat dinegara berkembang 95% tidak mengalami perlakuan atau *treatment* terlebih dahulu sebelum dibuang kebadan perairan seperti sungai dan danau. Hal tersebut karena keterbatasan keuangan, teknologi yang kurang, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta lemahnya penegakan peraturan industri yang membuang limbahnya kebadan perairan.

Adapun contoh kasus pencemaran lingkungan hidup akibat kurangnya pengawasan dan pembiaran-pembiaran oleh aparat pemerintah adalah kasus pencemaran Sungai Batang Sariak oleh limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir. Berdasarkan observasi awal selama dilakukan wawancara dengan Bapak Roni Hendri Eka Putra, mantan Kepala Bidang Pengawasan dan Konservasi BLHKP Kabupaten Pasaman Barat tanggal 29 Agustus 2014, kasus pencemaran Sungai Batang Sariak oleh limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir sudah terjadi sejak pabrik tersebut mulai beroperasi tahun 2001. Sungai Batang Sariak yang tercemar yang mengalir sepanjang 25 KM ini dimanfaatkan masyarakat tradisional yang

bermukim di sekitar aliran sungai untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sehingga mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat di sungai dan pengurangan pemanfaatan sungai oleh masyarakat. Tidak hanya itu, sungai yang tercemar oleh limbah cair PKS yang bermuara ke Laut Sasak juga telah mencemari laut. Nelayan mengeluh akan hasil tangkapan dan radius daerah tangkapan ikan semakin berkurang setiap harinya. Menurut Bapak Roni, PKS PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Ophir yang terletak di Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, dalam proses memproduksi minyak kelapa sawitnya belum disertai dengan pengolahan limbah cair yang baik, bahkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di pabrik tersebut sudah lama tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pencemaran Sungai Batang Sariak karena belum diolahnya limbah cair secara baik oleh PKS PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Ophir harus mendapat perhatian serius. Kurangnya pengawasan serta pembiaran terhadap PKS yang tidak sadar lingkungan oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat secara terus menerus dapat mengancam kehidupan masyarakat, khususnya yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Batang Sariak dan masyarakat nelayan Laut Sasak. Seharusnya BLHKP Kabupaten Pasaman Barat sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan pengolahan limbah cair PKS harus lebih konsisten dalam menjalankan tugas yang diembannya, mampu mengatasi kendala-kendala dalam usahanya sebagai aparat pengawas pengolahan limbah cair di daerah, serta mampu mencari solusi akan permasalahan terkait pencemaran sungai dan laut oleh limbah cair pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan fenomena di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah personil Tim Pengawas Lingkungan Hidup BLHKP Kabupaten Pasaman Barat belum mencukupi.
2. SDM personil Tim Pengawas Lingkungan Hidup BLHKP Kabupaten Pasaman Barat belum memadai.
3. Pencemaran sungai oleh limbah cair mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat di sungai dan pengurangan pemanfaatan sungai oleh masyarakat.
4. Pencemaran laut oleh limbah cair berdampak pada radius dan hasil tangkapan nelayan.
5. Belum diolahnya limbah cair secara baik oleh PKS PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Unit Usaha Ophir.

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga tujuan dan manfaat tercapai dan tidak menyimpang maka perlu adanya pembatasan masalah. Penulis membatasi penelitian ini pada Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir Oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa kendala-kendala yang dialami BLHKP Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan BLHKP Kabupaten Pasaman Barat dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir?
4. Bagaimana dampak pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar aliran Sungai Batang Sariak dan Laut Sasak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dialami BLHKP Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir.
3. Untuk menganalisis upaya BLHKP Kabupaten Pasaman Barat dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir.
4. Untuk menganalisis dampak pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar aliran Sungai Batang Sariak dan Laut Sasak.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara khususnya Azas-Azas Manajemen dan Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Memberi masukan bagi peneliti lanjutan yang berhubungan dengan pengawasan pengolahan limbah cair PKS PT. Perkebunan Nusantara VI (persero) Unit Usaha Ophir oleh BLHKP Kabupaten Pasaman Barat.